

# KEPEMIMPINAN NASIONAL, BUDAYA POLITIK, DAN PARTISIPASI PUBLIK

## NATIONAL LEADERSHIP, POLITICS CULTURE, AND PUBLIC PARTICIPATION

Muslimin<sup>1</sup> dan Sorni Paskah Daeli<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Center for Policy Analysis (CEPSIS) Makassar  
Komp.Graha Sentosa Sudiang Blok B/34, Makassar  
*e-mail:* [musliminbputra@yahoo.com](mailto:musliminbputra@yahoo.com)

<sup>2</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Jalan Kramat Raya No. 132, Senen – Jakarta Pusat  
*e-mail:* [sornipaskah@yahoo.com](mailto:sornipaskah@yahoo.com)

Diterima: 4 Juli 2012; direvisi: 26 Juli 2012; disetujui: 10 Agustus 2012

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gagasan baru mengenai sosok kepemimpinan tahun 2014. Wacana yang muncul saat ini hanya terkesan bagi-bagi kekuasaan antara satu partai dan partai lainya dalam satu koalisi, sementara perdebatan tentang cita-cita nasional masih menempati ruang-ruang sempit. Pertarungan gagasan-gagasan besar seharusnya yang harus dijadikan budaya politik dalam setiap kegiatan politik seperti pemilu. Sehingga kesan pemilu hanya kepentingan segelintir orang yang mengakibatkan merebaknya apatisisme politik dalam bentuk golongan putih dapat dihindari dan berubah menjadi partisipasi politik.

**Kata kunci:** kepemimpinan, gagasan, politik, pemilu.

### Abstract

*This paper aims to provide new ideas about leadership figure in 2014. The discourse that emerged today only seem to divide power between the parties and other parties in a coalition, while the debate about national ideals still occupy cramped spaces. The fight should have great ideas that should be a political culture in any political events such as elections. So the impression only the interests of the few elections that resulted in widespread political apathy in the form of white group can be avoided and turned into political participation.*

**Keywords:** leadership, ideas, politics, elections.

## PENDAHULUAN

Partisipasi publik dalam perspektif ilmu politik merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan karena terkait dengan legalitas kontrak politik antara pemimpin politik dengan publik. Partisipasi publik tercermin dari keikutsertaan rakyat memberikan suaranya pada fase pelaksanaan pemilihan umum digelar maupun pada fase pembuatan kebijakan publik.

Tingkat partisipasi publik dalam politik akan sangat menentukan tingkat aspirasi rakyat dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik. Partisipasi publik yang rendah dapat menyebabkan rendahnya pula tingkat keabsahan seseorang yang terpilih menjadi pemimpin politik, sebaliknya partisipasi publik yang tinggi berarti pemimpin politik yang bersangkutan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi pula sebagai penganut amanah suara rakyat.

Partisipasi publik dan partisipasi politik dalam pembahasan ini merupakan satu kesatuan. Konsep partisipasi publik selama ini banyak digunakan dalam literatur ilmu administrasi publik, sementara partisipasi politik adalah konsep *genuine* dari ilmu

politik. Meski memiliki perbedaan cabang ilmu, tetapi dalam konteks tulisan ini akan digunakan secara bergantian tanpa membedakan maknanya.

Sebelum membahas pengertian partisipasi publik, terlebih dahulu dikupas pengertian "publik". Secara umum publik diartikan sebagai semua warga negara non pemerintah. Dalam literatur pelibatan publik, kelompok yang perlu dilibatkan dinyatakan sebagai publik relevan. Thomas J Clayton (1995) menyatakan bahwa publik relevan terhadap suatu isu adalah semua representasi group atau individu masyarakat, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir, sebagai publik yang dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk penyelesaian suatu isu (Putra, 2005:35).

Dalam perspektif ilmu administrasi publik, konsep partisipasi publik lebih banyak dikaitkan dengan konsep *governance* atau *good governance*. Lembaga internasional yang pertama kali mempopulerkan istilah *governance* adalah Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan pada tahun 1992 berjudul *Governance and Development*. Defenisi *Governance* menurut Bank Dunia adalah "...the manner in which power is exercised in the

*management of a country's social and economic resources for development*". Sedang lembaga internasional lainnya seperti Asia Development Bank (ADB) mengartikulasikan 4 (empat) elemen esensial dari *good governance* yaitu *accountability, participation, predictability and transparency*.

Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa Garry Stocker (1998) sebagai penggagas pertama *Good Governance* dengan konsepnya "*Five Proposition*". Konsep tersebut adalah: (1) pemanfaatan seperangkat institusi dan aktor, baik dalam maupun luar pemerintahan; (2) menyatupadunya kekuatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat; (3) kesalingtergantungan antara ketiga kekuatan tersebut; (4) terbentuknya jaringan tersendiri antara ketiga kekuatan tersebut; dan (5) pemerintah cukup sebagai *catalytic agent* yang memberikan arahan, tidak perlu menjalankan sendiri.

Prof. Sadu Wasistiono juga mengaitkan istilah "Partisipasi" dengan *good governance* dengan merujuk pada *good governance* versi UNDP yang memiliki 9 karakteristik yakni: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Dari karakteristik tersebut, kemudian Prof Sadu memberi batasan tentang partisipasi: sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi mediasi seperti DPRD, LSM dan sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat terbentuk buha pikiran, dana, tenaga maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya (Wasistiono, 2005:57).

Prof Sadu juga memberi syarat utama warga negara berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan yaitu: (1) ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); (2) ada keterlibatan secara emosional; (3) memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya (Ibid, hal. 51-63).

Demikian halnya dengan S.H. Sarundajang yang jug amengacu pada UNDP dan lembaga internasional tentang *good governance* menyebut 10 prinsip *good governance* yakni: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas dan profesionalisme (Sarundajang, 2005:275-280).

Konsep partisipasi dalam konteks ini menurut Sarundajang adalah bahwa partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi itu meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral (Ibid. hal. 275-6).

Menurut Hetifah Sumarto, *governance* diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. *Governance* menuntut redefenisi peran negara, dan berarti adanya redefenisi pula pada peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri (Sumarto, 2003:1-2).

Sebuah defenisi lain tentang partisipasi publik diberikan Migley (dalam Muluk, 2007:48-49) yang mengacu pada Resolusi PBB pada awal tahun 1970-an. Dalam resolusi tersebut, partisipasi publik (biasa juga disebut dengan partisipasi masyarakat) berkonotasi "*the direct involvement of ordinary people in local affairs*". Resolusi ini menyatakan bahwa partisipasi membutuhkan keterlibatan orang-orang secara sukarela dan demokratis dalam hal: (a) sumbangsuhnya terhadap usaha pembangunan, (b) penerimaan manfaat secara merata, (c) pengambilan keputusan yang menyangkut penentuan tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan serta penerapan program pembangunan sosial dan ekonomi. Mengacu pada pandangan ini, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua hal: partisipasi otentik (*authentic participation*) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria tersebut. Jika criteria tersebut tidak dipenuhi seluruhnya maka hal ini akan disebut partisipasi semu (*pseudo-participation*).

Partisipasi publik dalam proses kebijakan publik adalah keterlibatan masyarkat dalam forum pengambilan keputusan dan bukannya sebatas dengan pendapat ataupun konsultasi semata. Hal inilah yang dimaksud Charles Lindbloom sebagai *Partisan Mutual Adjustment* (PMA) yaitu penyesuaian pandangan kebijakan dengan realitas yang berjalan, serta pada proses negosiasi antar kepentingan dari para *stakeholder* kebijakan (Putra, 2005:36).

Dengan partisipasi publik, yang ingin dicapai sesungguhnya adalah transparansi dalam proses kebijakan publik. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi adalah prinsip yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Masing-masing adalah instrument yang diperlukan untuk mencapai prinsip

yang lainnya, dan ketiganya adalah instrument yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik (Ibid.).

Operasionalisasi konsep partisipasi menurut konsep Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah : (1) tindakan bersama (collective action). Keinginan pemerintah untuk memonopoli proses kebijakan publik dan dalam melaksanakannya harus ditinggalkan dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis dan partisipatif; (2) Masing-masing aktor akan berinteraksi dan saling memberikan pengaruh (mutually inclusive). Kebijakan publik yang paling efektif dari sudut pandang teori *governance* adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi; (3) *Governance as a socio cybernetic system*, artinya dampak hasil pemerintahan (kebijakan pemerintah) bukanlah produk dari apa yang dilakukan (tindakan ) pemerintah pusat melainkan keseluruhan produk (the total effect) dari intervensi dan interaksi dari banyak aktor (pemerintah, legislatif, LSM, swasta, masyarakat dan sebagainya) dalam menangani masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi, dan sebagainya; (4) peran pemerintah cukup sebagai “*catalytic agent*”, “*enabler*” dan “*commissioner*”, yang memberikan arahan (more steering) dan tidak perlu menjalankan sendiri (less rowing) proses kebijakan publik (ibid, hal. 75-81).

Hampir semua pakar ilmu politik kenamaan memberikan batasan tentang partisipasi politik, seperti Norman H Nie dan Sidney Verba, Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, dan Mirriam Budiardjo. Menurut Nie dan Verba, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warganegara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Sementara itu Huntington dan Nelson memberi batasan tentang partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Lain halnya dengan pakar ilmu politik Indonesia, Mirriam Budiardjo. Menurut guru besar FISIP UI tersebut, partisipasi politik adalah seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Merujuk pada Huntington dan Nelson (dalam Pahlevi, 2005:102-103), ada empat model dalam menghubungkan partisipasi politik dengan variabel-

variabel pembangunan yakni : model borjuis, model otokratis, model populis dan model teknokratis. Pada model pertama, terdapat dua pilihan perluasan partisipasi : tahap perluasan partisipasi politik yang diperuntukkan kepada kelas menengah di daerah perkotaan, kemudian perluasan partisipasi kepada golongan rendah di kota dan pedesaan.

Pada model otokratis kekuasaan di pusatkan dan partisipasi politik golongan menengah ditindas, pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dan pemerataan sosial ekonomi digairahkan sebagai upaya memperoleh dukungan dari golongan rendah. Sedang model teknokratis memiliki ciri utama adalah partisipasi politik yang rendah, penanaman modal (khususnya asing) dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya keitmbapngan pendapatan. Model ini mengasumsikan partisipasi politik perlu ditekan minimal untuk sementara guna menggairahkan pembangunan ekonomi. Sedang model populis kebalikan dari model teknokratis dimana tingkat partisipasi politik tinggi yang diikuti dengan perluasan kebijakan jaminan dan kesejahteraan sosial. Efeknya adalah adanya peningkatan konflik sosial dan polarisasi dalam masyarakat untuk memperoleh “kue ekonomi”.

Dalam konteks partisipasi politik tipikal sistem politik Indonesia, dikenal satu kelompok yang tidak memberikan partisipasi politik secara sadar yakni golongan putih (golput). Istilah ini sangat kental pada masa Orde Baru yang dikenal sebagai rezim otoritarian. Keberadaan golput pada masa Orde Baru selalu dikaitkan sebagai bentuk resistensi masyarakat kelas menengah terpelajar terhadap praktek otoritarian yang dipraktekkan pemerintah Orde Baru dibawah tokoh sentral Presiden Soeharto yang memerintah selama tiga dekade sejak 1968-1998.

Fenomena golput masih terjadi dalam era pasca Orde Baru, meski kondisi politik telah berubah drastis dimana telah terjadi liberalisasi politik terjadi yang berdampak pada partisipasi politik yang berlangsung massif bahkan destruktif pada beberapa kasus. Tabel dibawah ini membuktikan bahwa pada Pemilu 2004 masih terjadi aksi golput di kalangan masyarakat pemilih.

Tingkat partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh para kandidat yang bertarung karena terkait dengan etnisitas, golongan politik dan golongan agama. Dibading ketiga kalsifikasi sosial diatas, kesamaan etnis jauh lebih berpengaruh dibanding golongan politik dan golongan agama. Apalagi golongan agama, selama ini semua kandidat presiden adalah menganut agama Islam yang menjadi agama mayoritas rakyat Indonesia.

Beberapa survei dan polling digelar berkaitan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2009 mendatang. Salah satu survei terbaru adalah survei politik yang digelar Lembaga Survei Nasional (LSN) yang dipimpin Umar S Bakry. Hasil survei yang paling menyolok adalah keunggulan SBY (50,0%) bila berpasangan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X

**Tabel 1. Jumlah Pemilih, Suara Sah dan Golput pada Pemilu Legislatif 2004**

Identifikasi	Jumlah	Persentase (%)
Penduduk	216.948.359	100
Pemilih terdaftar	148.000.369	68,22
Pemilih Terdaftar yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	23.580.030	15,93
Pemilih Sah yang Menggunakan Hak Pilih	124.420.339	84,07
Suara Sah	113.462.414	91,19
Suara Tidak Sah	10.957.925	8,81
Golput	34.537.955	23,34

Sumber: Kompas, 6 Mei 2004

dibanding bila SBY (43,8%) mempertahankan duet dengan Jusuf Kalla (JK). Survei yang dilakukan selama bulan Januari-Februari tersebut memiliki responden sebanyak 2.178 dengan menggunakan metode penarikan sampel *multistage random sampling* dengan *margin error* 2,1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Teknik pengumpulan data adaah wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner. Selain itu, survei LSN juga menanyakan tokoh alternatif kepada responden dan hasilnya adalah Sri Sultan menempati tempat teratas dengan dukungan (14,7%), kemudian Prabowo Subianto (7,7%) dan Sutiyoso (5,4%) (Sindo, 26 Maret 2008 hal. 6).

Survei politik sebelumnya pernah dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2008 dengan komposisi: Susilo Bambang Yudhoyono (34%), Megawati Soekarnoputri (24%), Sri Sultan Hamengkubuwono (7%), Wiranto (4%), Amien Rais (3%), Jusuf Kalla (2%) dan Sutiyoso 2%). Angka tujuh persen bagi Sri Sultan Hamengkubuwono X kurang lebih sama dengan popularitas SBY setahun sebelum pemilihan presiden 2004. Menurut Lembaga ini, Sri Sultan berpeluang menang pada 2009 (Majalah Tempo, Edisi 30 Maret 2008, hal.27-28).

Sementra itu, pada Oktober 2007 jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa mayoritas pemilih (49,5%) masih menginginkan SBY sebagai presiden berikutnya (2009-2014), sementara yang tidak menginginkan 33,4%, dan tidak tahu/tidak menjawab 17,1%.

Meski SBY masih banyak diunggulkan oleh pemilih, survei Indo Barometer yang dipimpin M Qodari menunjukkan SBY yang pernah menjadi *President Idol* pada pilpres 2004 lalu menunjukkan penurunan popularitas. Popularitas SBY dibawah 50% dapat menjadi lampu kuning bagi SBY. Jika publik mendapatkan figur alternatif, maka dapat menjadi batu sandungan bagi SBY pada pilpres 2009 mendatang. Dari sejumlah nama yang muncul sekarang iini seperti Megawati dan Wiranto masih merupakan "stok lama" sehingga SBY masih diatas angin. Figur-figur alternatif seperti Sri Sultan Hamengkubowono X dan Sutiyoso dapat menjadi figur alternatif pesaing SBY pada pilpres 2009.

Calon presiden (capres) yang paling dikenal menurut Indobarometer pada survei November-Desember 2007 adalah SBY (97,7%) dan Megawati (97,4%) sementara Wiranto (79,8%) dan Sutiyoso

(63,9%). Sementara tingkat kesukaan pada capres yang tertinggi pada SBY (89,2%) dan Megawati (82,7%) sementara Wiranto (75,4%) dan Sutiyoso (69,2%).

Survei lain yang dapat menjadi bahan diskusi adalah survei yang dilakukan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (Pusdeham) yang dilakukan pada Agustus-September 2007. Temuan survei tersebut adalah responen yang memilih pasangan SBY-JK pada pilpres 2004 lalu hanya 26% yang memastikan akan memilih kembali pasangan ini (incumbent) pada pilpres 2009, sementara 36% responden yang memilih SBY-JK pada putaran pertama Pilpres 2004 yang kembali memastikan memilih incumbent. Sementara pemilih terhadap Megawati Sukarno Putri tergolong loyal karena respondne yang memilih putri pertama Bung Karno tersebut sebanyak 47% sudah menyatakan akan kembali memilih Megawati pada pilpres 2009. Namun demikian, ternyata publik tetap merindukan hadirnya pemimpin baru/calon alternatif yang ditunjukkan oleh responden yang mencapai 70%.

Sementara itu survei yang dilakukan pada Februari 2007 oleh Lingkaran Survei Indonesia yang dipimpin Denny J.A. menunjukkan pesimisme publik atas pemerintahan SBY-JK. Kinerja pemerintahan SBY-JK hanya diapresiasi oleh publik pada bidang keamanan, sementara bidang ekonomi tingkat kepuasan publik hanya 29,7%. Penilaian buruk dibidang ekonomi pemeintahan SBY-JK justru datang dari pemilih Partai Demokrat (51%) dan Partai Golkar (45,1%). Sedang bidang pemberantasan korupsi yang pernah membawa hasil postifi pada tahun pertama pemerintahan SBY-JK sebesar 97,9%, kini hanya diapresiasi positif oleh 33,3% publik.

Penurunan tingkat popularitas SBY berdasarkan beberapa survei berkorelasi postifi dengan kemerosotan tingkat kepercayaan publik pada kinerja pemerinahan. Ketidakpercayaan pada pemerintahan SBY dapat diartikan sebagai delegitimasi pada satu sisi, sedang pada sisi lain dapat menjadi bahan evaluasi bagi SBY untuk menggenjot kinerjanya dalam sisa masa pemerintahannya agar lebih mendapat apresiasi dari publik. Dagradasasi kepercayaan publik pada pemerintahan SBY karena beberapa kebijakan instan yang anti populis seperti kebijakan bidang energi menyangkut subsidi BBM yang banyak mendatangkan keresahan masyarakat luas.

## PEMBAHASAN

### Profil Kandidat Presiden 2009

#### 1. Susilo Bambang Yudhoyono

Meski terjadi penurunan popularitas, ekspektasi publik terhadap SBY masih lebih tinggi dibanding capres-capres lainnya seperti ditunjukkan survei Indo Barometer sebesar 49,5%, sementara yang tidak menginginkan hanya 33,4%. Bagi partai Demokrat, ketokohan SBY masih yang terbaik sehingga dapat diprediksi akan tetap menjadikannya sosok kandidat presiden bagi Partai yang baru "seumur jagung" tersebut.

SBY adalah lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan Adhi Makasaya yang satu angkatan dengan Prabowo Subianto, Agus Wirahadikusumah dan Ryamizard Ryacudu. Lahir di Pacitan, Jawa Timur, 19 September 1949 adalah tunggal dari pasangan Raden Sukotjo dan Siti Habibah. Setelah lulus SMA pada akhir 1968, SBY tidak langsung masuk AKABRI yang menjadi cita-citanya sejak masa kecil tetapi sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin pada Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya. Pada 1970, SBY muda diterima di Akabri Magelang, Jawa Tengah setelah dinyatakan lulus pada ujian akhir penerimaan di Bandung.

Pendidikan militernya di luar negeri adalah di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS pada 1976, Infantry Officer Advanced Course di tempat yang sama pada 1982-1983 dengan meraih honor graduate. Kemudian Jungle Warfare Training di Panama pada 1983, Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman pada 1984, Command and general Staff College di Fort Leavenworth, di Kansas, AS pada 1990-1991. Sementara didalam negeri adalah mengikuti Kursus Komandan Batalyon di Bandung pada 1985, Seskoad di Bandung pada 1988-1989.

Jabatan pertamanya adalah Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad sebagai Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330 Tri Darma Kostrad pada tahun 1974-1976 dengan membawahi langsung sekitar 30 prajurit. SBY memimpin peleton ini bertempur ke Timor Timur. Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi Konadan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad pada 1977, setelah itu ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad pada 1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad pada 1979-1981 dan Paban Muda Sops SUAD pada 1981-1982.

Ketika bertugas di Mabes TNI AD, SBY mendapat kesempatan sekolah ke AS yakni mengikuti Infantry Officer Advanced Course pada 1982-1983 di Fort Benning sekaligus praktek on the job training di 82-nd Airborne Division, Fort Bragg, AS pada 1983. Pada 1983-1985, SBY menjabat sebagai Komandan Sekolah Pelatih Infantri. Pada 1989-1992 sempat menjadi dosen Seskoad dan ditempatkan pada Dinas Penerangan TNI AD dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudrajat.

Ketika Edy Sudrajat menjadi Panglima ABRI, SBY ditarik ke Mabes ABRI sebagai Koordinator Staf Pribadi Pangab pada 1993.

Pada 1993-1994, SBY kembali bertugas ke kesatuan tempur sebagai Komandan Brigade Linud 17 KujangI/Kostrad bersama dengan Letkol Ryamizard Ryacudu. Kemudian pada 1994 menjabat Asops Kodam Jaya dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro pada 1995. Pada tahun ini juga SBY ditugaskan ke Bosnia Herzegovina menjadi perwira PBB sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, menjabat Kepala Staf Kodam Jaya pada 1996 dan menjadi Pangdam II/Sriwijaya pada 1996-1997 sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada 1998-1999 menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI sekaligus Ketua Fraksi ABRI MPR pada Sidang Istimewa MPR 1998.

Karir politik pertamanya pada 27 Januari 2000 ketika dipercayakan sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dalam kabinet masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Kemudian SBY dipindahkan menjabat Menko Polkam pada 10 Agustus 2001. Pada masa pemerintahan Megawati, SBY tetap dipercayakan menjabat Menko Polkam dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2004 agar dapat leluasa menjalankan hak politiknya diantaranya mendirikan Partai Demokrat yang akan menjadi kendaraan politiknya menuju kursi RI 1. pada pilpres 2004, pasangan SBY-JK terpilih sebagai pemenang pilpres yang digelar secara langsung dan mulai bertugas pada 20 Oktober 2004. Pada 2005, SBY mendapat julukan sebagai Indoensia's Crisis Manager dari majalah ekonomi Businessweek Edisi 11 Juli dan menduduki urutan pertama diantara 25 pemimpin yang paling berpengaruh di kawasan Asia (Sindo, 13/01/2008).

Dalam pemilu presiden 2009, SBY memilih menggandeng Boediono, seorang dari kalangan profesional menjadi cawapres dan memilih meninggalkan JK yang telah berhasil mendongkrak popularitasnya selama lima tahun terakhir. JK yang telah berhasil menyelesaikan agenda pemerintahan SBY justru dijadikan seteru, sehingga Partai Golkar memilih mengusung sendiri ketua umumnya sebagai calon presiden dan siap berhadap-hadapan dengan SBY dan mitra koalisinya yakni PD, PKB, PKS dan PAN serta 19 partai kecil lainnya.

#### 2. Jusuf Kalla

Meski belum menyatakan secara resmi akan menjadi calon presiden pada pilpres 2009, JK banyak dipersepsikan akan menjadi capres karena merupakan pemenang pemilu legislatif dan meraih suara terbesar. Keberadaan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif 2004 lalu menjadikannya sebagai pemilih suara terbesar di DPR. Berbagai survei politik juga

tetap menempatkan JK sebagai kandidat presiden yang layak diperhitungkan.

Jusuf Kalla (JK) dibesarkan didalam keluarga Nahdiyyin, lahir Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. JK adalah putra kedua dari 17 bersaudara. Ayahnya Haji Kalla adalah seorang tokoh Nahdatul Ulama Sulawesi Selatan dan seroang pengusaha. Ibunya, Hajjah Atirah juga berwirausaha dengan berjualan sarung sutra Bugis. JK menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin pada 1967 dan The European Institute of Business Administration Founrainebleu, Prancis pada 1977.

Usaha perdangan yang dirintis orang tua JK diserahkan kepemimpinannya sesaat setelah JK diwisuda menjadi sarjana ekonomi pada akhir 1967 dan sejak 1982 seluruh bisnis Grup Hadji Kalla dipimpin JK. Disamping meneruskan usaha lama yang dirintis orang tuanya seperti ekspor hasil bumi, JK mulai mengembangkan jenis bisnis baru seperti usaha pembangunan jalan, jembatan dan irigasi. Hingga sekarang, Grup Hadji Kalla dibawah pimpinan JK telah menjelma menjadi grop konglomerasi bisnis yang memiliki banyak bidang usaha seperti perdagangan mobil, konstruksi bangunan, jembatan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan, perikanan, kelapa sawit dan telekomunikasi.

Kesuksesan menakhodai grub bisnis NV Hadji Kalla, JK terpilih menjadi Ketua KADIN Daerah Sulawesi Selatan dari tahun 1985 hingga 1997 dan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia 1997-2002, disamping Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan 1985-1995 hingga menjadi Wakil Ketua ISEI Pusat (1987-2000) dan Penasehat ISEI Pusat (2000-sekarang).

Pada masa mahasiswa, JK pernah menjadi ketua HMI Cabang Makassar pada 1965-1966 serta menjabat Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun yang sama dan menjadi Ketua KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) Sulawesi Selatan pada 1966 dan Ketua Presidium KAMI 1967-1969. pada tahun 1965, sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golkar, JK terpilih sebagai Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968) sehingga menghantarkannya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. JK menikah dengan Hj Mufidah pada 1967 dan dikarunia satu putra dan empat putri serta sembilan cucu.

Dalam bidang kemasyarakatan, JK menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Athirah, serta menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Al Ghazali yang membawahi Universitas Islam Makassar. Selain itu, JK menjabat Ketua Dewan Penyantun pada beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin Makassar, Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Universitas Negeri Makassar (UNM) disamping sebagai ketua Ikatan

Alumni UNHAS dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.

JK memasuki dunia politik nasional mulai 2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan merangkap Kepala Bulog. Pada masa pemerintahan Megawati, JK kembali masuk kabinet dengan jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). JK kemudian mundur dari kabinet Megawati dan memilih bersaing dengan Megawati. Dengan kesediaannya berpasangan dengan SBY dalam pilpres 2004. pada Oktober 2004, JK dilantik sebagai Wakil Presiden RI ke 10 menjadi wakil presiden RI yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali Desember 2004, JK terpilih menjadi Ketua umum Partai Golkar setelah mengalahkan Akbar Tanjung. Sebelumnya JK adalah Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar sempat menjadi Anggota MPR pada 1982-1987 utusan Golkar dan Anggota MPRI RI utusan daerah pada 1997-1999 (Sindo, 6/01/2008).

Seiring perubahan politik, pada pemilu presiden 2009 JK justru berbalik arah menjadi pesaing SBY. Dengan menggandeng Wiranto sebagai cawapres, JK tampil dengan jargon "lebih cepat lebih baik". Jargon tersebut berhasil menjadi slogan politik mengiringi keduanya dalam melakukan sosialisasi politik menjelang pilpres 8 Juli 2009 mendatang.

### 3. Megawati Soekarnoputri

Sosok Megawati Soekarnoputri sebelumnya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang diperistri oleh Taufik Kemas yang berasal dari Palembang. Megawati mulai memasuki dunia politik pada era 1990-an ketika Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI untuk menarik dukungan dan membangun spirit perjuangan Soekarno pada PDI kala itu untuk menghadapi Pemilu.

Setelah memasuki era reformasi PDI pecah, Megawati memiliki mendirikan blok politik sendiri bernama PDI-Perjuangan dan berhadapan dengan Soerjadi yang telah mengajaknya terjun ke dunia politik. Pada pemilu 1999, PDI-P tampil menjadi pemenang pemilu berkat kepopuleran Megawati Soekarnoputri.

Namun meski menjadi pemenang pemilu tidak serta merta mengantarkan Megawati ke kursi kepresidenan. Sistem pemilihan presiden yang kala itu masih dilakukan MPR memaksa Megawati mengakui Abdurrahman Wahid tampil sebagai Presiden yang diusung koalisi partai-partai Islam dalam Poros Tengah. Tetapi ditengah jalan pada 2001 Abdurrahman Wahid diberhentikan disebabkan sifat otoriter dan kinerja pemerintahan yang sangat buruk. Megawati yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Presiden kemudian tampil menggantikannya hingga periode pemerintahannya selesai pada 2004.

Pada pemilu presiden 2004, sistem pemilihan presiden dirubah menggunakan sistem pemilihan langsung. Megawati tampil menjadi kontestan pilpres berpasangan dengan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi. Pada putaran pertama tampil lima calon presiden pada pilpres: Megawati, SBY, Amien Rais, Wiranto dan Hamzah Haz. Karena kelimanya tidak satupun yang memperoleh suara diatas 50 persen+1, selanjutnya Megawati dan SBY yang berhak lolos ke putaran kedua sebagai peraih suara terbanyak pertama dan kedua. Akhirnya pemilu presiden berhasil dimenangkan SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Kini pemilu presiden 2009 kembali Megawati tampil sebagai kontestan menggandeng Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah sosok fenomenal karena berhasil mengantarkan partai baru yang didirikannya (Partai Gerindra) masuk dalam sepuluh besar partai yang lolos *parlementary treshold*.

## **PENUTUP**

Wacana pemilu presiden 2014 yang memenuhi ruang-ruang publik masih sepi dari perdebatan gagasan model dan cara mencapai cita-cita pembangunan bangsa dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Wacana yang muncul hanya terkesan bagi-bagi kekuasaan antara satu partai dan partai lainya dalam satu koalisi, sementara perdebatan tentang cita-cita nasional masih menempati ruang-ruang sempit. Terhitung hanya Prabowo yang mensosialisasikan gagasan-gagasan besarnya untuk mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pertarungan gagasan-gagasan besar seharusnya yang harus dijadikan budaya politik dalam setiap event politik seperti pemilu. Sehingga kesan pemilu hanya kepentingan segelintir orang yang mengakibatkan merebaknya apatisisme politik dalam bentuk golongan putih dapat dihindari dan berubah menjadi partisipasi politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia.  
*Kompas*. Edisi 6 Mei 2004
- Muluk, M Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak Untuk Publik*, Yogyakarta: Resist Book.
- Seputar Indonesia*, Harian. Edisi 06 Januari 2008. 13 Januari 2008, 20 Januari 2008 dan 27 Januari 2008.
- Tempo*, Majalah. Edisi 30 Maret 2008.
- Wasistiono, Sadu, Prof. Dr., MM. 2005. "Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan *Good Governance*", dalam Syamsuddin Haris, Ed. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI-AIPI-Partnership.

